

Uni Eropa dan Indonesia bertukar pengalaman dan menjajaki langkah-langkah untuk mengatur drone bawah air

- *Pertemuan pakar internasional yang diselenggarakan Uni Eropa dan Indonesia di Jakarta berlangsung dengan berbagi pengalaman dan menjajaki langkah-langkah untuk memajukan kerangka peraturan untuk kendaraan bawah air tak berawak (UUV).*
- *Peserta dari Uni Eropa, Negara-negara Anggota Uni Eropa, Indonesia dan Jepang menyatakan komitmen yang kuat untuk lebih memperkuat keamanan maritim.*

Jakarta, 26 Juni 2024: Sebagai langkah signifikan untuk memastikan penggunaan drone bawah air secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, para peserta dari Indonesia dan Uni Eropa melangsungkan Pertemuan Pakar Internasional tentang Kerangka Regulasi untuk Kendaraan Bawah Air Tak Berawak (UUV).

Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintahan, industri dan akademisi untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan kerangka peraturan komprehensif yang menyeimbangkan inovasi dan peraturan.

Meningkatnya ketersediaan dan meluasnya penggunaan UUV telah menambah aktivitas drone bawah air di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Saat ini peraturan hanya mengatur perizinan dan lisensi UUV untuk beberapa situasi.

Pertemuan dua hari ini berlangsung dengan pertukaran pengalaman antara para peserta dan menjajaki langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk memajukan kerangka peraturan UUV. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) dan Uni Eropa, dengan dukungan proyek Uni Eropa “Enhancing Security In and With Asia” (ESIWA).

Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan: “Pasar Kendaraan Bawah Air Tak Berawak atau UUV diperkirakan tumbuh antara 12 dan 20% per tahun, dan kemungkinan akan meningkat dua kali lipat pada akhir dekade ini. Namun, tidak banyak perdebatan mengenai klasifikasi kendaraan ini, dan kesesuaiannya dengan tata kelola kelautan yang ada. Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya, yang bekerja sebagai ‘Tim Eropa’, memiliki sejumlah keahlian teknologi, dan Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki pengalaman dan wawasan. Refleksi bersama ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan dan positif untuk mempertahankan pendekatan berbasis aturan untuk Lautan, dan untuk mendukung pekerjaan Organisasi Maritim Internasional (IMO) di bidang ini.”

Jodi Mahardi, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, mengatakan: “Saya yakin bahwa Pertemuan Para Ahli Internasional tentang Kendaraan Bawah Air Tak Berawak akan memberikan platform berharga bagi kita untuk terlibat dalam diskusi yang bermanfaat mengenai Kesadaran Domain Maritim dan praktik terbaik keamanan maritim.”

“Ketergantungan kita pada keamanan dan keberlanjutan perairan kita didasarkan pada keterbukaan dan konektivitas, dan hal ini penting untuk mendorong dan menjaga keselamatan, keamanan dan kedamaian lingkungan maritim kita,” tambah Mahardi.

Dalam pertemuan tersebut, peserta dari Uni Eropa, Indonesia dan Jepang menyatakan komitmen untuk lebih memperkuat keamanan maritim.

Diskusi mendalam terfokus pada aspek-aspek penting peraturan UUV, termasuk:

(1) **Keamanan dan Standar:** Penekanan diberikan pada pengembangan standar dan protokol keselamatan yang ketat untuk memastikan pengoperasian UUV yang andal dan aman;

(2) **Perlindungan Lingkungan:** Kebutuhan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari operasi UUV disorot, dengan pedoman yang diusulkan untuk melindungi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati yang sensitif;

(3) **Keamanan dan Privasi:** Perjanjian internasional yang jelas dianggap perlu untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan privasi, di samping protokol untuk perlindungan data dan penggunaan teknologi pengawasan yang etis;

(4) **Pertimbangan Hukum dan Etis:** Pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya memperjelas kerangka hukum yang mengatur penggunaan UUV di perairan internasional dan mengatasi implikasi etis dari penerapan UUV di wilayah yang memiliki budaya penting; dan

(5) **Kolaborasi dan Inovasi:** Para peserta menyerukan peningkatan kolaborasi internasional dan pembinaan kemitraan lintas sektor untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta mendorong inovasi dalam kerangka peraturan yang terstruktur.

###

Tentang Kemenko Marves

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (disingkat Kemenko Marves) adalah kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian/ lembaga terkait di bidang kemaritiman dan investasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Indonesia sebagai poros maritim global untuk mewujudkan: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
- Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/ lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Tentang Uni Eropa

Uni Eropa adalah persatuan ekonomi dan politik dari 27 Negara Anggota. Bersama-sama, Uni Eropa telah membangun zona yang stabil, demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keragaman budaya, toleransi dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian atas upayanya mencapai perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar di dunia, serta sumber dan tujuan investasi asing langsung terbesar di dunia. Secara kolektif, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya adalah donor terbesar Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), yang menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.

27 negara anggota Uni Eropa (sesuai urutan protokol) adalah: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Irlandia, Yunani, Spanyol, Perancis, Italia, Siprus, Latvia, Lituania, Luksemburg, Hongaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finlandia dan Swedia.

Tentang ESIWA

Proyek ESIWA berupaya untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan pertahanan Uni Eropa dengan Indo-Pasifik dalam empat bidang tematik: kontraterorisme dan pencegahan kekerasan ekstrim, manajemen krisis, keamanan siber dan keamanan maritim. Proyek ini didanai bersama oleh Uni Eropa, Kantor Luar Negeri Federal Jerman dan Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis. Kegiatan ESIWA diterapkan bersama oleh Perusahaan Jerman untuk Kerjasama Internasional (GIZ) & Expertise France.

Kegiatan ESIWA di bidang keamanan maritim bertujuan untuk mendorong tatanan maritim yang adil, transparan dan berdasarkan aturan, serta memperkuat respons maritim terhadap tantangan keamanan.

Kegiatan ESIWA sebelumnya di Indonesia telah mencakup keamanan maritim, aturan standar minimum untuk perlakuan terhadap anak-anak, penerapan hukum internasional di dunia maya, norma-norma PBB tentang perilaku negara yang bertanggung jawab, praktik yang baik untuk menanggapi kejahatan dunia maya, anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme, manajemen krisis, menghubungkan perempuan yang bekerja dalam penegakan hukum kontraterorisme, tur buku Pedoman Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) Uni Eropa, dukungan terhadap pengembangan Pusat Pengetahuan Indonesia tentang Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan (#IKHub). Sejak September 2020, ESIWA mulai mendukung Delegasi Uni Eropa di Jakarta dan implementasi Rencana Kegiatan Uni Eropa.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Muhamad Irfansyah July Samudra Mahardika

Communication Officer
Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Republic of Indonesia
m.irfansyah@maritim.go.id

Rahul Venkit

Communications & Visibility Expert
Enhancing the EU's Security Cooperation In and With Asia (ESIWA) project
rahul.venkit@expertisefrance.fr